

Kuesioner
Perspektif Stakeholders terhadap UU Nomor 25 Tahun 2004
(Untuk BAPPEDA)

Biro Hukum
Kementerian PPN/BAPPENAS

DATA RESPONDEN

NAMA	:	
INSTANSI	:	
JABATAN	:	
TELEPON	:	
TANGGAL PENGISIAN	:	

**KEGIATAN SURVEY PERSPEKTIF STAKEHOLDERS TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Diskusi dan pengisian kuesioner ini difokuskan untuk pembahasan struktur pengaturan (legal structure), substansi pengaturan (legal substance), maupun budaya hukum (legal culture) atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan pengetahuan dan kepakaran yang dimiliki, Bapak/Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan, maupun memberikan pernyataan yang merupakan eksplorasi lebih mendalam atas jawaban yang telah diberikan. **Identitas Bapak/Ibu dalam pengisian kuesioner akan dijaga dan tidak disebarluaskan.**

Sumbangan pemikiran dari Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan nasional dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan nasional itu sendiri. **Sumbangan pemikiran dari Bapak/Ibu merupakan masukan yang berharga bagi perumusan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan.**

KRITERIA RULE	
1.	<p>Menurut Anda, apakah urutan pasal-pasal dalam UU 25/2004 sudah sistematis?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Sudah</p> <p><input type="checkbox"/> b. Belum</p>
2.	<p>Menurut Anda, manakah diantara UU 25/2004 dan UU 32/2004 yang lebih Anda gunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan?</p> <p><input type="checkbox"/> a. UU 25/2004</p> <p><input type="checkbox"/> b. UU 32/2004</p>
3.	<p>(menyambung pertanyaan nomor 2) Mohon dapat disebutkan alasannya</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p>
4.	<p>Menurut Anda, bagaimanakah hubungan antara UU 25/2004 dan UU 32/2004 dalam hal pengaturan proses penyusunan perencanaan pembangunan di daerah?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Sinkron</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak sinkron dan tumpang tindih</p> <p><input type="checkbox"/> c. Merupakan duplikasi yang seharusnya dapat diintegrasikan</p> <p>Mohon dapat disebutkan alasannya</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
5.	<p>Menurut Anda, selain PP 39/2006 dan PP 40/2006 yang merupakan turunan dari UU 25/2004, apakah peraturan turunan amanat dari UU 25/2004 telah lengkap?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Ya</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak</p>
6.	<p>Menurut Anda, apakah masih diperlukan aturan teknis/operasional lainnya dalam menindaklanjuti amanat dari UU 25/2004?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Perlu (lanjut ke pertanyaan nomor 7)</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak perlu (lanjut ke pertanyaan nomor 8)</p>
7.	<p>Jika jawaban nomor 3 PERLU, mohon sebutkan pengaturan dalam hal apa yang masih Anda anggap perlu dalam melengkapi UU 25/2004</p> <p>a.</p>

	<p>b.</p> <p>c.</p>
8.	<p>Apakah Anda pernah menemukan pasal dalam UU 25/2004 yang rumusannya tidak jelas?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Pernah</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak pernah</p> <p>Jika jawaban Anda PERNAH, mohon disebutkan pasalnya</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p>
9.	<p>Apakah Anda pernah menemukan dalam UU 25/2004 suatu pasal yang bertentangan dengan pasal lainnya?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Ya</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak</p> <p>Jika jawaban Anda YA, mohon disebutkan pasalnya</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p>
KRITERIA OPPORTUNITY	
10.	<p>Menurut Anda, apakah mekanisme yang diatur dalam UU 25/2004 memberatkan instansi Anda?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Ya</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak</p>
11.	<p>Menurut Anda, hal apa yang paling diutamakan dalam menyusun RKPD?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Sekedar membuat untuk memenuhi kewajiban UU.</p> <p><input type="checkbox"/> b. Membuat dengan merujuk pada RPJM/RPJMD/RPJP/RPJPD.</p> <p><input type="checkbox"/> c. Membuat sesuai kebutuhan daerah meskipun tidak merujuk pada RPJMD/RPJM/RPJPD/RPP.</p> <p><input type="checkbox"/> d. Jawaban lain</p>
KRITERIA CAPACITY	
12.	<p>Menurut Anda, apakah aturan waktu/<i>time frame</i> yang diatur dalam UU 25/2004 dalam rangka proses penyusunan dan penetapan rencana dapat dilaksanakan?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Ya</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak</p> <p>Jika TIDAK, mohon sebutkan alasan anda</p> <p>a.</p>

	b.
13.	Apakah instansi Anda melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi staf terkait dengan penyusunan dan penetapan rencana pembangunan? <input type="checkbox"/> a. Ya <input type="checkbox"/> b. Tidak jika jawaban anda YA, mohon sebutkan jenis kegiatannya a. b.
14.	Menurut Anda, apakah instansi Anda mengalami kesulitan anggaran untuk penyelenggaraan Musrenbangda? a. Ya b. Tidak
KRITERIA COMMUNICATION	
15.	Apakah Anda pernah berkonsultasi mengenai cara penyusunan dan penetapan rencana pembangunan kepada Bappenas? <input type="checkbox"/> a. Pernah <input type="checkbox"/> b. Tidak Pernah, karena
16.	Apakah Anda pernah menyampaikan permasalahan dalam proses penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan kepada Bappenas? <input type="checkbox"/> a. Pernah <input type="checkbox"/> b. Tidak Pernah, karena
17.	(menyambung pertanyaan nomor 16) Jika PERNAH, apakah Anda mendapatkan respon/ <i>feedback</i> dari Bappenas? <input type="checkbox"/> a. Ya <input type="checkbox"/> b. Tidak
18.	(menyambung pertanyaan nomor 16) Menurut Anda, permasalahan apa yang Anda hadapi? a. b. c.
19.	Apakah pernah ada sosialisasi mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan dokumen

	<p>perencanaan yang dilakukan oleh Bappenas di instansi Anda?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Pernah</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak Pernah (<u>jika jawaban Anda TIDAK PERNAH, lanjut ke pertanyaan 23</u>)</p>
20.	<p>Jika PERNAH, apakah sosialisasi yang dilakukan Bappenas membantu/mempermudah Anda dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Ya</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak</p>
21.	<p>Apakah frekuensi fasilitasi dan bimbingan teknis terkait mekanisme penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan cukup diberikan oleh Bappenas kepada instansi Anda?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Ya</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak</p>
22.	<p>Apakah substansi/kedalaman materi dalam bimtek yang diberikan oleh Bappenas sudah cukup bagi kebutuhan instansi Anda/staf Anda?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Ya</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak</p>
23.	<p>Apakah Anda pernah berkonsultasi mengenai cara penyusunan dan penetapan rencana pembangunan kepada Instansi lain selain Bappenas?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Pernah, mohon disebutkan instansinya</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak Pernah</p>
24.	<p>Apakah Anda pernah menyampaikan permasalahan dalam proses penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan kepada Instansi lain selain Bappenas?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Pernah, mohon disebutkan instansinya</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak</p>
25.	<p>(menyambung pertanyaan nomor 24) Jika PERNAH, apakah Anda mendapatkan respon/<i>feedback</i> dari Instansi lain tersebut?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Ya</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak</p>
26.	<p>(menyambung pertanyaan nomor 24) Menurut Anda, permasalahan apa yang Anda hadapi?</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p>
27.	<p>Apakah pernah ada sosialisasi mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan yang dilakukan oleh instansi lain (selain Bappenas) di instansi Anda?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Pernah, mohon disebutkan</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak Pernah (lanjut ke pertanyaan nomor 31)</p>
28.	<p>Jika PERNAH, apakah sosialisasi yang dilakukan Instansi lain tersebut membantu/mempermudah Anda dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan?</p>

	<input type="checkbox"/> a. Ya <input type="checkbox"/> b. Tidak
29.	Apakah frekuensi fasilitasi dan bimbingan teknis terkait mekanisme penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan cukup diberikan oleh instansi lain kepada instansi Anda? <input type="checkbox"/> a. Ya <input type="checkbox"/> b. Tidak
30	Apakah substansi/kedalaman materi dalam bimtek yang diberikan oleh Instansi lain sudah cukup bagi kebutuhan instansi Anda/staf Anda? <input type="checkbox"/> a. Ya <input type="checkbox"/> b. Tidak
KRITERIA INTEREST	
31.	Menurut Anda, apakah melaksanakan mekanisme penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan sesuai dengan UU 25/2004 memberikan dampak positif bagi kepentingan instansi Anda? a. Ya b. Tidak
32.	Apabila YA, mohon sebutkan alasannya a. b. c.
33.	Apabila TIDAK, mohon sebutkan alasannya a. b. c.
34.	Apakah DPRD di daerah Anda mempengaruhi dalam proses perencanaan? <input type="checkbox"/> a. Ya <input type="checkbox"/> b. Tidak
35.	Apabila jawaban pertanyaan di atas YA, mohon dapat disebutkan hal-hal apa sajakah yang dipengaruhi oleh DPRD dalam proses perencanaan?
KRITERIA PROCESS	
36.	Menurut Anda, apakah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur UU 25/2004 telah sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan?

	<input type="checkbox"/> a. Ya <input type="checkbox"/> b. Belum Jika jawaban anda BELUM, mohon sebutkan
37.	Menurut Anda, apakah sistem perencanaan pembangunan nasional dalam UU 25/2004 sudah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan? <input type="checkbox"/> a. Sudah, karena <input type="checkbox"/> b. Belum, karena
38.	Menurut Anda, apakah sistem perencanaan pembangunan nasional dalam UU 25/2004 sudah dapat mencapai tujuan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah? <input type="checkbox"/> a. Sudah, karena <input type="checkbox"/> b. Belum, karena
39.	Menurut Anda, apakah sistem perencanaan pembangunan nasional dalam UU 25/2004 sudah dapat mencapai tujuan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarruang? <input type="checkbox"/> a. Sudah, karena <input type="checkbox"/> b. Belum, karena
40.	Menurut Anda, apakah sistem perencanaan pembangunan nasional dalam UU 25/2004 sudah dapat mencapai tujuan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar waktu? <input type="checkbox"/> a. Sudah, karena <input type="checkbox"/> b. Belum, karena

41.	<p>Menurut Anda, apakah sistem perencanaan pembangunan nasional dalam UU 25/2004 sudah dapat mencapai tujuan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintah?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Sudah, karena</p> <p><input type="checkbox"/> b. Belum, karena</p>
42.	<p>Menurut Anda, apakah sistem perencanaan pembangunan nasional dalam UU 25/2004 sudah dapat mencapai tujuan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pusat dan daerah?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Sudah, karena</p> <p><input type="checkbox"/> b. Belum, karena</p>
43.	<p>Menurut Anda, apakah instansi Anda memiliki mekanisme tersendiri untuk mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Ya <input type="checkbox"/> b. Tidak</p> <p>Apabila YA, bentuk mekanismenya seperti apa?</p> <p>1.</p> <p>2.</p>
44.	<p>Menurut Anda, apakah pada waktu penyusunan RPJPD memperhatikan RPJPN?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Ya <input type="checkbox"/> b. Tidak</p> <p>alasan.....</p> <p>.....</p>
45.	<p>Menurut Anda, apakah pada waktu penyusunan RPJMD memperhatikan RPJMN?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Ya <input type="checkbox"/> b. Tidak</p> <p>alasan.....</p> <p>.....</p>
46.	<p>Menurut Anda, apakah pada waktu penyusunan RKPD memperhatikan RKP?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Ya</p>

	<input type="checkbox"/> b. Tidak alasan.....
47.	Apakah Anda mengalami kesulitan substansi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan (RKPD, RPJMD, dan RPJPD) ? <input type="checkbox"/> a. Ya, alasan..... <input type="checkbox"/> b. Tidak
48.	Apakah Anda mengalami kesulitan teknis dalam proses penyusunan dokumen perencanaan (RKPD, RPJMD, dan RPJPD) ? <input type="checkbox"/> a. Ya, alasan..... <input type="checkbox"/> b. Tidak
49.	Menurut Anda, apakah dalam penyusunan RKPD, RPJMD, dan RPJPD sudah sinkron dengan proses penyusunan RKP, RPJMN dan RPJPN? a. Ya b. Tidak, alasan
50.	Menurut Anda, apakah daerah telah menyelenggarakan Musrenbang dari tingkat desa sampai tingkat provinsi? <input type="checkbox"/> a. Ya <input type="checkbox"/> b. Tidak, mohon disebutkan alasannya
51.	Menurut Anda, apakah penyelenggaraan Musrenbang dari tingkat desa sampai tingkat provinsi ini bermanfaat? <input type="checkbox"/> a. Ya, mohon disebutkan alasannya <input type="checkbox"/> b. Tidak, mohon disebutkan alasannya

	<p>.....</p>
52.	<p>Menurut Anda, apakah pelaksanaan Musrenbangnas untuk menyusun RKP sudah cukup mengakomodir keinginan daerah?</p> <p>a. Ya</p> <p>b. Tidak, alasan.....</p>
53.	<p>Menurut Anda, masih pentingkah pelaksanaan Musrenbangnas?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Ya, alasan</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak, (lanjut ke pertanyaan nomor 55)</p> <p>alasan</p> <p>.....</p>
54.	<p>Menurut Anda, adakah yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan Musrenbangnas?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Ya, hal-hal yang perlu diperbaiki :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak, alasan</p> <p>.....</p>
KRITERIA IDEOLOGI	
55.	<p>Menurut Anda, apakah Bappenas perlu memberikan <i>reward</i> kepada daerah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan di daerah?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Ya</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak</p>
56.	<p>Jika jawaban anda YA, mohon disebutkan bentuk <i>reward</i> seperti apa yang Anda harapkan?</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
57.	<p>Menurut Anda, apakah dalam mekanisme implementasi UU 25/2004 perlu dilengkapi dengan sanksi?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Ya</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak</p>
58.	<p>Jika jawaban anda YA, mohon disebutkan bentuk sanksinya seperti apa yang anda harapkan?</p> <p>1.</p>

	<p>2.</p> <p>3.</p>
59.	<p>Menurut Anda, apakah sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam UU 25/2004 masih diperlukan?</p> <p><input type="checkbox"/> a. Ya</p> <p><input type="checkbox"/> b. Tidak, karena</p> <p>.....</p>
60.	<p>Saran perbaikan apa yang Anda usulkan untuk perbaikan dalam UU 25/2004 terutama dalam proses penyusunan dan penetapan rencana?</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
61.	<p>Sistem Perencanaan Pembangunan seperti apa yang ideal dan yang anda harapkan?</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>

--0000--